



**ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH  
DENGAN MENGGUNAKAN RASIO  
KEUANGAN PADA ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN  
DAIRI**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Memperoleh  
Gelar Sarjana Akuntansi Pada Fakultas Sosial Sains  
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

**Nella Manullang  
1915100099**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2024**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL : ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH DENGAN MENGGUNAKAN RASIO KEUANGAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAIRI

NAMA : NELLA MANULLANG  
N.P.M : 1915100099  
FAKULTAS : SOSIAL SAINS  
PROGRAM STUDI : Akuntansi  
TANGGAL KELULUSAN : 16 April 2024

DIKETAHUI

DEKAN



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.

KETUA PROGRAM STUDI



Dr Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si

DISETUJUI  
KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I



Dra Mariyam, MSi., Ak.

PEMBIMBING II



Dito Aditia Darma Nst, S.E., M.Si.

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NELLA MANULANG  
Npm : 1915100099  
Fakultas/Program Studi : SOSIAL SAINS /AKUNTANSI  
Judul Skripsi : ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH  
DENGAN MENGGUNAKAN RASIO  
KEUANGAN PADA ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN DAIRI

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan izin bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Universitas Pembangunan Panca Budi Medan untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsi saya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensinya apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.



Medan, 07 Mei 2024

(Nella Manulang)  
NPM: 1915100099

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nella Manullang

NPM : 1915100099

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Sosial Sains

Jenjang : Strata-1 (S-1)

Alamat : Jalan Batu Kapur No. 260, Kelurahan Sidikalang, Kecamatan  
Sidikalang, Kabupaten Dairi

No. HP/WA : 085270631064

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan sehubungan dengan hal tersebut maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 07 Mei 2024

Penulis,



Nella Manullang

NPM.1915100099

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat kinerja keuangan daerah dengan menggunakan rasio keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi. penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan mendeskripsikan data yang dikumpulkan. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu rasio keuangan seperti, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi PAD, rasio keserasian keuangan daerah, dan rasio pertumbuhan keuangan daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Rasio kemandirian daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi sudah cukup baik dan mandiri dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat. Rasio efektivitas keuangan daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi belum cukup efektif dalam menjalankan tugasnya. Hal itu menunjukkan bahwa kinerja keuangan Rasio efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi belum efisien dan dapat dikatakan bahwa tingkat pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi belum cukup efisien. Rasio Keserasian Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi belum cukup baik dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunannya secara optimal. Rasio pertumbuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi belum menunjukkan keadaan yang cukup baik dan positif. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi belum berjalan dengan baik.

**Kata Kunci: Kinerja Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Keserasian, dan Rasio Pertumbuhan.**



## **ABSTRACT**

*The aim of this research is to look at regional financial performance using financial ratios in the Regional Government of Dairi Regency. This research is a quantitative descriptive research by describing the data collected. This research was conducted at the Regional Government of Dairi Regency. The data collection techniques used in this research are observation and documentation. The data analysis technique used is financial ratios such as regional financial independence ratio, PAD effectiveness ratio, PAD efficiency ratio, regional financial harmony ratio, and regional financial growth ratio. The results of this research show that, the regional independence ratio of the Regional Government of Dairi Regency is quite good and independent in meeting funding needs for carrying out government tasks, development and community social services. The regional financial effectiveness ratio of the Regional Government of Dairi Regency is not effective enough in carrying out its duties. This shows that the financial performance of the Dairi Regency Regional Government's efficiency ratio is not yet efficient and it can be said that the level of achievement of the Dairi Regency Regional Government's financial performance is not efficient enough. The Dairi Regency Regional Government's Harmony Ratio is not good enough in prioritizing the allocation of funds to routine spending and development spending optimally. The growth ratio of the Regional Government of Dairi Regency has not shown a fairly good and positive condition. This shows that the financial performance of the Regional Government of Dairi Regency has not been going well.*

**Keywords: Regional Financial Performance, Independence Ratio, Effectiveness Ratio, Efficiency Ratio, Harmony Ratio, and Growth Ratio.**

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanna Waa Ta'ala karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Analisis Kinerja Keuangan Daerah Dengan Menggunakan Rasio Keuangan Pada Anggaran Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi”**.

Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar sarjana Strata Satu (S-1) Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E, M.M selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak Dr. E Rusiadi, SE., MSi selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Ibu Dr. Oktarini Khamilah Siregar, SE., MSi selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu Dra. Mariyam, Ak., M.Si selaku dosen pembimbing 1 (satu) yang sudah banyak membantu memberikan kritik dan saran terhadap perbaikan skripsi saya.

5. Bapak Diro Aditia Darma Ns, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing 2 (dua) yang sudah banyak memberikan masukan di dalam perbaikan skripsi Seluruh dosen dan pegawai Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
6. Kedua orang tua Penulis, Bapak Z Manulang dan Ibu M Br. Girsang, yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat serta atas kesebarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis, yang merupakan anugrah terbesar dalam hidup. Penulis Berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan
7. Sahabat saya Inra Roy Ganda Sihombing, S.Kep, Ners yang sudah sangat banyak membantu penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh Teman-teman Penulis di UNPAB angkatan 2019 yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu. Terimakasih atas pertemanan selama ini.
9. Semua Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah dengan tulus ikhlas memberikan doa dan Motivasi sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu segala kritik dan saran untuk penyempurnaan skripsi ini sangat diharapkan penulis. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Medan, Mei 2024

Nella Manulang  
NPM: 1915100099



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah .....	8
1.3 Rumusan Masalah .....	9
1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	10
1.4.1 Tujuan Penelitian.....	10
1.4.2 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Keaslian Penelitian .....	11
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Landasan Teori .....	14
2.2 Penelitian Terdahulu.....	33
2.3 Kerangka Konseptual .....	34
<b>BAB III : METODOLOGI PENELITIAN</b>	
3.1 Pendekatan Penelitian.....	36
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian .....	36
3.3 Populasi dan Sampel.....	37
3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional .....	38
3.4.1 Variabel Penelitian .....	38
3.4.2 Definisi Operasional.....	38
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	39
3.6 Teknik Analisis Data .....	40
<b>BAB VI : HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Hasil Penelitian.....	44
4.1.1 Gambaran Umum Pemerintah Kota Medan.....	44
4.1.2 Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....	46
4.1.3 Analisis Rasio Efektivitas PAD.....	48
4.1.4 Analisis Rasio Efisiensi PAD.....	49
4.1.5 Analisis Rasio Kecerassian Keuangan Daerah.....	51

4.1.7 Analisis Rasio Pertumbuhan Daerah.....	53
4.2 Pembahasan .....	54
<b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1 Kesimpulan.....	60
5.1 Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>BIODATA</b>	

## DAFTAR TABEL

		<b>Halaman</b>
Tabel 1.1	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Pemkab Dairi... ..	5
Tabel 2.1	Kriteria Penilaian Rasio Kemandirian.....	29
Tabel 2.2	Kriteria Penilaian Rasio Efektivitas .....	30
Tabel 2.3	Kriteria Penilaian Rasio Efesiensi.....	31
Tabel 2.4	Kriteria Penilaian Rasio Keserasian.....	31
Tabel 2.5	Penelitian Terdahulu .....	33
Tabel 3.1	Jadwal Penelitian.....	37
Tabel 3.2	Definisi Operasional Variabel.....	38
Tabel 4.1	Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian Tahun 2018-2022. ....	46
Tabel 4.2	Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas Tahun 2018-2022 ....	48
Tabel 4.3	Hasil Perhitungan Rasio Efesiensi Tahun 2018-2022.....	50
Tabel 4.4	Hasil Perhitungan Rasio Keserasian Tahun 2018-2022....	51
Tabel 4.5	Hasil Perhitungan Rasio Pertumbuhan Tahun 2020-2022. ....	51

**DAFTAR GAMBAR**

	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual .....	35

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia mengalami kemajuan pesat seiring dilaksanakannya otonomi daerah. Otonomi daerah adalah pemberian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerahnya serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Hak otonomi kepada masing-masing daerah atau kabupaten akan memberikan kebebasan untuk mengolah dan meningkatkan sumber pendapatannya, demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah tersebut.

Semakin tinggi realisasi pendapatan yang dicapai, hendaknya dapat mencerminkan semakin baik kinerja pemerintah daerah sesuai dengan hasil yang telah dicapai. Oleh sebab itu, masyarakat dituntut untuk lebih berfikir kritis terhadap kinerja pemerintah daerah, dibutuhkannya transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga sektor publik. Akuntabilitas tidak sekedar menunjukkan kemampuan Lembaga sector publik dalam penggunaan uang public, tetapi juga menunjukkan kemampuan memberikan jaminan dari penggunaan sumber-sumber dana publik termasuk pengalokasian sumber daya ekonomis, efisien dan efektif melalui pelaksanaan manajemen public yang baik (Indrayani & Khairunnisa, 2018).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa, Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dibantu oleh Menteri Negara dan

setiap Menteri bertanggung jawab atas urusan pemerintahan tertentu dalam pemerintahan. Kewenangan otonomi yang luas mewajibkan pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata dan berkesinambungan. Dengan diberlakukannya kewenangan otonomi daerah, diharapkan semua daerah di Indonesia mampu melaksanakan semua urusan pemerintahan dan pembangunan dengan bertumpu pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimilikinya. Keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan otonomi daerah dapat dilihat dari kinerja keuangan Pemerintah Daerah tersebut (Rahayu, 2016).

Untuk mewujudkan kemampuan daerah tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan mampu atau mandiri didalam membiayai kegiatan pemerintah daerahnya dengan tingkat ketergantungan yang presentasenya lebih kecil kepada Pemerintah Pusat sehingga Pendapatan Asli Daerah harus menjadi bagian yang terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan Pemda.

Kinerja merupakan suatu pencapaian yang telah direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan, maka kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan dapat dikatakan kinerjanya sangat bagus. Apabila pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan, maka kinerjanya dikatakan kurang baik.

Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Pendapatan Asli Daerah Lain-lain yang sah, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2014. Salah satu sumber penerimaan daerah terbesar yang berasal dari dalam wilayahnya sendiri adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang mana pendapatan asli daerah menjadi tolak ukur dalam menilai tingkat kemandirian pemerintahan daerah.

Pendapatan asli daerah terdiri dari hasil pajak daerah (pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan, pajak alat berat, pajak bahan bakar, dan pajak rokok), hasil retribusi daerah (retribusi jasa umum, pelayanan persampahan, dan retribusi daerah perizinan), dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Dari beberapa sumber-sumber pendapatan asli daerah salah satu sumber yang memiliki potensi yang cukup tinggi di Kabupaten Dairi yaitu sektor pertanian, sektor pariwisata dan sektor perpajakan (pajak daerah). Sektor Pertanian merupakan sektor yang memiliki potensi tinggi di Kabupaten Dairi dan menjadikan sektor pertanian sebagai sumber mata pencaharian mereka. Salah satu dari sub sektor pertanian yang memiliki peranan penting dalam perekonomian adalah subsektor tanaman pangan. Sektor Pariwisata merupakan salah satu bidang yang mempunyai peluang besar sebagai faktor untuk memajukan perekonomian nasional pada masa sekarang ini dan sektor pariwisata di Kabupaten Dairi cukup terkenal karna memiliki wisata yang sering dikunjungi oleh orang luar dari Kabupaten Dairi. Pajak Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah daerah terus berusaha meningkatkan pendapatan daerahnya dengan cara memaksimalkan pajak daerah yaitu seperti pajak kendaraan.



Pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan pembandingan skema dan pelaksanaannya. Selain itu dapat juga digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja khususnya keuangan pemerintah daerah pada periode berikutnya. Menurut Susanti, Raharjo dan Oemar (2017) Ada beberapa cara untuk mengukur Kinerja Keuangan Daerah yaitu dengan menggunakan Rasio Kinerja Keuangan Daerah. Beberapa rasio yang biasa digunakan adalah: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian dan Rasio Pertumbuhan.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Dairi merupakan badan daerah yang memegang peranan dan fungsi strategis di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset daerah Kabupaten Dairi. Pemerintah Kabupaten Dairi sebagai salah satu kota di Sumatera Utara yang memiliki potensi PAD yang cukup kecil dikarenakan wilayahnya yang tidak terlalu luas. Dengan adanya sistem desentralisasi Kabupaten Dairi harus mengelola seluruh aktivitas keuangan dengan seefektif mungkin serta harus dapat memberikan inovasi untuk pemerintahannya agar dapat lebih mandiri dalam mengelola serta meningkatkan kinerja keuangan daerahnya.

Berikut adalah gambaran APBD Pemerintah Kabupaten Dairi selama lima tahun anggaran:

**Tabel 1.1 Struktur APBD Pemerintah Kabupaten Dairi**

<b>Struktur APBD</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Pendapatan</b>	<b>1.119.621.517.914,97</b>	<b>1.158.061.086.952,21</b>	<b>1.198.957.368508,40</b>	<b>1.202.630.009.618,17</b>	<b>1.208.784.276.096,71</b>
PAD	98.515.273.851,97	106.410.053.810,21	118.058.491.717,40	137.222.874.687,17	138.048.354.142,71
Dana Perimbangan	797.868.476.540,00	823.561.984.813,00	918.996.175.287,00	924.917.829.684,00	898.901.919.396,00
Lain-lain Pendapatan yang Sah	223.237.767.523,00	228.098.048.329,00	161.902.701.504,00	137.489.305.247,00	106.834.002.558,00
<b>Belanja</b>	<b>1.105.051.440.542,58</b>	<b>1.157.789.251.487,93</b>	<b>1.251.702.935.123,17</b>	<b>1.190.043.052.154,00</b>	<b>1.237.857.086.076,33</b>
Belanja Apratur/Tidak Langsung	712.198.557.297,00	783.302.879.327,00	767.647.149.563,00	707.831.657.947,00	705.929.247.886,00
Belanja Publik Langsung	745.816.883.245,58	772.486.372.160,93	837.055.785.560,17	835.211.894.207,00	884.927.838.190,33
<b>Surplus/Defisit</b>	<b>115.606.077.372,39</b>	<b>14.271.835.464,28</b>	<b>153.745.566.614,77</b>	<b>113.586.957.464,17</b>	<b>96.072.809.979,62</b>
<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>121.028.560.309,33</b>	<b>128.143.082.781,72</b>	<b>128.414.918.246,00</b>	<b>70.868.964.197,23</b>	<b>122.529.140.025,40</b>
SILPA	121.025.678.209,33	128.134.637.681,72	128.414.918.246,00	70.868.964.197,23	83.226.140.025,40
Penerimaan Piutang Daerah	5.882.100,00	10.445.100,00	21.335.400,00	-	49.303.000.000,00
<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>10.500.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>7.819.772.834,00</b>	<b>-</b>	<b>7.816.865.557,00</b>
Penyertaan Modal Pendana	10.500.000.000,00	-	7.819.772.834,00	-	7.816.865.557,00
<b>Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan</b>	<b>115.134.637.681,72</b>	<b>115.414.918.246,00</b>	<b>57.868.064.197,23</b>	<b>70.455.921.661,40</b>	<b>75.639.464.488,78</b>

*Sumber: BPKAD data diolah (2023)*

Dari gambaran struktur APBD di atas, menunjukkan bahwa pendapatan daerah Kabupaten Dairi lebih besar diperoleh dari dana perimbangan atau dana transfer dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ini menunjukkan bahwa Kabupaten Dairi masih bergantung pada dana transfer dari pusat dan belum mampu mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya dengan menggali sumber asli daerah untuk membiayai pembangunan daerahnya. Kesadaran dan partisipasi masyarakat akan pembayaran pajak dan retribusi juga salah satu hal yang menyebabkan PAD yang dihasilkan Pemerintah Kabupaten dairi sedikit dan belum bisa diandalkan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunannya.

Belanja daerah kabupaten dairi menunjukkan bahwa belanja rutin (operasi) masih lebih besar dibandingkan dengan belanja modal (Pembangunan). Besarnya alokasi dana untuk belanja operasi terutama dikarenakan besarnya dinas dinas otonomi dan belanja pegawai untuk gaji ASN. Dengan ini dapat menunjukan bahwa Pemerintah Kabupaten Dairi yang lebih condong pada pengeluaran-pengeluaran rutin untuk pemenuhan aktivitas pemerintahan dan belum memperhatikan pembangunan daerahnya.

Suatu daerah dapat dikatakan sebagai daerah otonomi yaitu dapat ditunjukan melalui kemampuan keuangan daerahnya. Kemampuan keuangan daerah yakni masing-masing daerah otonom harus dapat mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat dengan terus melakukan usaha untuk mencari dan meningkatkan sumber keuangan yang ada didaerahnya dengan menggali sumber asli daerah(Astiti & Mimba, 2017).

Menurut Lubis dan Hafni (2017) salah satu ciri utama daerah mampu dalam melaksanakan otonomi daerah adalah terletak pada kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya dengan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat mempunyai proporsi yang semakin mengecil dan diharapkan bahwa PAD harus menjadi bagian terbesar dalam memobilisasi dan penyelenggaraan pemerintah daerah. Ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional memberikan kesempatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas korupsi dan nepotisme. Penyelenggaraan

pemerintahan daerah sebagai sub sistem pemerintahan negara dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat. Dengan kata lain, mengoptimalkan mutu jangkauan pelayanan dan kesejahteraan rakyat.

Menurut Sari (2020) dana perimbangan atau dana transfer memiliki fungsi yang sangat penting dalam pencapaian efisiensi dan keseimbangan dalam memberikan layanan jasa publik, dikarenakan berpengaruh terhadap kinerja keuangan dimana pendapatan yang diperoleh dari pusat selalu menggambarkan ketergantungan daerah dalam memenuhi kebutuhannya terhadap pemerintah pusat yang berakibat menurunnya kinerja keuangan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sesuatu yang dasar dalam mempengaruhi APBD dikarenakan kontribusi PAD terhadap APBD sangatlah besar, semakin besar PAD maka semakin minim suatu daerah yang bergantung kepada pemerintah pusat (Sari, 2020).

Kemampuan daerah dalam menggali dan memanfaatkan potensi daerah untuk menghasilkan pendapatan asli daerah tentunya dapat meningkatkan pendapatan daerah. Pendapatan asli daerah yang dihasilkan daerah memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan sehingga pemerintah daerah mampu meminimalkan ketergantungannya terhadap bantuan pendanaan yang bersumber dari pusat.

Sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 pasal 10 disebutkan bahwa yang menjadi sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan daerah (*capital investment*) antara lain berasal dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan yang diterima oleh daerah dari Pempus. Dana perimbangan itu

sendiri terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK). Selain itu juga ada sumber lain yang berasal dari pembiayaan berupa Pinjaman Daerah. Pendapatan Asli Daerah itu sendiri terdiri dari pajak dan Retribusi Daerah, BUMD dan lain PAD yang sah.

Tingkat belanja modal (pembangunan) yang tinggi memberikan gambaran dari infrastruktur dan sarana yang dibangun. Pada umumnya apabila tingkat pembangunan tinggi, maka akan meningkatkan pelayanan yang diterima oleh masyarakat setempat yang akan memberikan dampak yang baik terhadap kinerja daerah tersebut. Hal ini membuktikan, semakin banyak belanja modal yang digunakan maka kemampuan dalam mengukur kinerja keuangan mengalami peningkatan (Sari, 2020).

Menurut Antari dan Sedana (2018), infrastruktur yang terdapat di suatu daerah diharapkan nantinya akan mampu menciptakan efisiensi pada berbagai sector, produktivitas masyarakat meningkat sehingga hal tersebut akan berimplikasi pada kinerja keuangan pemerintah daerah yang lebih baik.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan pengembangan penelitian lebih lanjut dengan judul penelitian, **“Analisis Kinerja Keuangan Daerah Dengan Menggunakan Rasio Keuangan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi”**.

## **1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Permasalahan yang akan diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Dairi masih sangat bergantung pada dana transfer dari Pemerintah Pusat dan belum mampu mengoptimalkan PAD.
2. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak, menghasilkan PAD Kabupaten Dairi sedikit dan belum bisa membiayai pembangunan daerahnya.
3. Pemerintah Kabupaten Dairi lebih condong pada pengeluaran rutin seperti belanja pegawai, subsidi kepala daerah, subsidi kepada pemerintah, dan pembayaran bunga, dan cukai sehingga belum mengoptimalkan pembangunan daerahnya.

### **1.2.2 Batasan Masalah**

Agar penelitian ini tidak menyimpang diluar dari konteks pembahasan maka penulis melakukan pembatasan pembahasan. Penelitian ini nantinya akan membahas terkait kinerja keuangan daerah Kabupaten Dairi yang dilihat dari rasio keuangan seperti, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi PAD, rasio keserasian keuangan daerah dan rasio pertumbuhan PAD. Penelitian ini dilakukan dengan melihat Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Dairi dari tahun 2018 sampai dengan 2022.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Sesuai dengan permasalahan yang di bahas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja keuangan daerah Kabupaten Dairi dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah, efektivitas PAD, efisiensi PAD, keserasian keuangan daerah, dan pertumbuhan PAD?

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja keuangan daerah Kabupaten Dairi?

#### **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini dibuat sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan daerah Kabupaten Dairi dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah, efektivitas PAD, efisiensi PAD, keserasian keuangan daerah, dan pertumbuhan PAD .
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja keuangan daerah Kabupaten Dairi.

##### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini nantinya diantaranya yaitu:

###### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan serta menjadi bahan evaluasi wawasan bagi perkembangan ilmu akuntansi yang berkaitan dengan kinerja keuangan daerah dilihat dari sisi rasio keuangan yang digunakan.

###### **b. Manfaat Praktis**

1. Bagi Penulis

Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta pengalaman dalam menerapkan pembelajaran yang selama ini diperoleh di bangku perkuliahan dengan dunia kerja nyata. Selain itu dapat mengetahui lebih dalam lagi tentang kinerja keuangan daerah yang dilihat dari rasio keuangan.



2. Bagi Pemerintah Kabupaten Dairi

Diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan solusi bagi pemerintahan terkait masalah kinerja keuangan yang dihadapi serta dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan baru dalam pemerintahan.

3. Bagi Universitas

Diharapkan dapat menjadi salah satu referensi leboh lanjut dalam pengembangan penelitian terutama terkait dengan analisis kinerja keuangan daerah dengan menggunakan rasio keuangan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan memberikan referensi penelitian lebih lanjut terkait rasio keuangan dan kinerja keuangan pemerintah daerah.

### **1.5 Keaslian Penelitian**

Pengembangan dalam penelitian ini didapati dengan melihat penelitian sebelumnya dan kemudian penulis melakukan replikasi dari penelitian Apri Diana tahun 2017 dengan judul penelitian “Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan Aset Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2012-2015). Kemudian penelitian ini dikembangkan kembali dengan judul, “Analisis Kinerja Keuangan Daerah Dengan Menggunakan Rasio Keuangan Pada Anggaran Pendpatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi”.

Adapun yang menjadi pembeda dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. **Model Penelitian:** Penelitian terdahulu menggunakan deskriptif kuantitatif, sedangkan penelitian ini juga menggunakan deskriptif kuantitatif dengan menggunakan rasio keuangan.
2. **Variabel Penelitian:** penelitian sebelumnya menggunakan 5 rasio keuangan daerah (rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efesiensi, rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan), sedangkan penelitian ini menggunakan 5 rasio keuangan daerah (rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efesiensi PAD, rasio keserasian keuangan daerah, dan rasio pertumbuhan PAD).
3. **Jumlah observasi/sampel (n):** Penelitian terdahulu menganalisis laporan keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2012-2015. Sedangkan penelitian ini menganalisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi periode 2018-2022.
4. **Waktu Penelitian:** Penelitian terdahulu dilakukan tahun 2017 sedangkan penelitian ini dilakukan tahun 2023.
5. **Lokasi Penelitian:** penelitian sebelumnya dilakukan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Trenggalek, sedangkan penelitian sekarang dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi, Sumatera Utara.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Teori *Stewardship* (*Stewardship Theory*) Pemerintahan

*Stewardship theory*, menggambarkan bahwa tidak ada suatu keadaan situasi para manajemen termotivasi untuk tujuan-tujuan individu melainkan lebih fokus untuk tujuan sasaran utama yaitu kepentingan organisasi. Asumsi filosofi mengenai teori *stewardship* dibangun berdasarkan sifat manusia yaitu dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas, serta dapat berlaku jujur untuk pihak lainnya. Dengan kata lain, *stewardship theory* memandang bahwa manajemen dapat berperilaku baik untuk kepentingan publik dan umumnya maupun *shareholders* pada khususnya. Teori ini menggambarkan hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Haliah (2012) berpendapat bahwa, “Tercapainya kesuksesan dalam sebuah organisasi dapat dicapai dengan cara maksimalisasi utilitas *principals* dan manajemen. Teori *stewardship* dapat diterapkan dalam penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan dan non profit lainnya”.

Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pelaksanaan *good governance*. Untuk mencapai tujuan tersebut dalam pembuatan LKPD, Pemerintah Daerah harus mengungkapkan secara jelas dan rinci terkait data akuntansi dan informasi-informasi lainnya secara relevan. LKPD yang dibuat oleh Pemerintah Daerah akan bermanfaat bagi berbagai kalangan pihak yang membutuhkan laporan keuangan tersebut. Pihak-

pihak tertentu dapat memanfaatkan LKPD tersebut untuk membuat keputusan-keputusan ekonomi.

Pada awal perkembangannya, akuntansi organisasi sektor publik bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan informasi antara *stewards* dengan *principals*. Akuntansi sebagai alat penggerak akuntansi serta diikuti dengan perubahan yang semakin kompleks, adanya spesialisasi dalam akuntansi serta perkembangannya dalam organisasi sektor publik, selaku *principals* sangat sulit untuk melakukan sendiri fungsi-fungsi pengelolaan. Pemisahan antara fungsi kepemilikan dengan fungsi pengelolaan sangat jelas. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta pertanggungjawaban atas pengelolaan kekayaan Negara, peran akuntansi sangat diperlukan. Secara prinsip akuntansi merupakan alat pengendalian diri, sebagai sarana pelaporan aktivitas manajer atas pengelolaan sumber daya manusia dan keuangan. Dengan adanya keterbatasan, pemilik sumber daya menyerahkan amanah pengelolaan sumber daya kepada pihak lain (*stewards/manajemen*) yang lebih siap. Kontrak hubungan antara *principals* dengan *stewards* didasari dengan kepercayaan, kolektif sesuai dengan tujuan organisasi. *Stewardship theory* merupakan model yang dapat diterapkan dalam organisasi sektor publik.

Implikasi teori *stewardship* terhadap penelitian ini yaitu dapat menjelaskan eksistensi pemerintah daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya dapat menampung aspirasi masyarakat, dapat memberikan pelayanan yang baik bagi publik, mampu membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi terpenuhi serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal.

### 2.1.2 Teori Keputusan Informasi Pemerintahan

Sejak Tahun 1954 telah dikenal dengan Teori Kegunaan Keputusan Informasi Akuntansi, dan menurut Ataubus dalam Lif (2017) telah menjadi referensi dari penyusunan kerangka konseptual *Financial Accounting Standar Board* (FASB) yaitu *Statement Of Financial Accounting Concept* (SFAC) yang berlaku di Amerika Serikat. Teori kegunaan keputusan informasi akuntansi mengandung komponen-komponen yang perlu dipertimbangkan oleh para penyaji informasi akuntansi agar cakupan yang ada dapat memenuhi kebutuhan para pengambil keputusan yang akan menggunakannya. *Statement of Financial Accounting Concept* (SFAC) Nomor 2 tentang kualitatif *Characteristic of Accounting Information* menggambarkan hirarki tentang kualitas informasi akuntansi dalam bentuk kualitas primer, kandungannya, dan kualitas sekunder. Kualitas primer dari informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi adalah nilai relevan dan nilai reliabilitas. Nilai relevan dan reliabilitas adalah dua kualitas utama yang membuat informasi akuntansi yang berguna dalam pengambilan keputusan.

Nilai relevan diklasifikasikan sebagai kualitas informasi untuk membuat suatu perbedaan dalam pengambilan keputusan oleh pemakai. Sedangkan reliabilitas didefinisikan sebagai kualitas pemberian jaminan bahwa informasi itu secara rasional bebas dari kesalahan/bias serta mewakili apa yang digambarkan. Agar relevan informasi harus bersifat logis jika dihubungkan dengan pengambilan keputusan. Informasi akuntansi harus memiliki kapabilitas untuk membuat suatu perbedaan pada suatu keputusan. Hal tersebut ditempuh dengan cara membantu

para pemakai dalam membentuk prediksi tentang hasil dari kejadian masa lalu, sekarang, dan yang akan datang atau untuk mengkonfirmasi prediksinya.

Teori kegunaan keputusan informasi sangatlah relevan, karena Standar Akuntansi Pemerintahan Indonesia (SPIP) mengadopsi karakteristik-karakteristik dari SFAC Nomor 2. Hanya saja Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) didasarkan pada empat persyaratan normatif yakni: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Untuk karakteristik konsistensi, menjadi bagian dari prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan.

### **2.1.3 Kinerja Keuangan Daerah**

#### **a. Definisi Kinerja Keuangan Daerah**

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dilaksanakan untuk menghasilkan sebuah laporan kinerja yang berkualitas serta selaras. Petunjuk Teknis implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diatur melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 yang menjelaskan secara detail mengenai perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revidi atas laporan kinerja instansi Pemerintah.

Adapun pendapat para ahli mengenai pengertian kinerja yaitu, Menurut Mohamad Mahsun (2014), “Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi”. Dalam hubungannya dengan Kinerja Keuangan di daerah, menurut penelitian yang dilakukan oleh Desi Agustina (2013) dalam jurnalnya,

“Kinerja Keuangan Daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD”. Menurut Halim (2017), “Kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah”.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Kinerja Keuangan Daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam mengelola keuangannya.

Pemerintah daerah sebagai pihak yang disertai tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan layanan sosial masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Adanya tuntutan pertanggungjawaban kinerja keuangan oleh masyarakat mengharuskan pemerintah daerah otonom untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kinerjanya. Penilaian kinerja tersebut harus dapat memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat ikut mengontrol kinerja keuangan daerah tersebut. Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah



daerah perlu disampaikan secara tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintah.

**b. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah**

Tujuan pengukuran Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah menurut Putri (2015) adalah untuk memenuhi tiga maksud, yaitu:

- 1) Untuk memperbaiki kinerja pemerintah, ukuran kinerja dimaksudkan untuk membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas dalam memberi pelayanan publik.
- 2) Untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
- 3) Untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Pendapat lain dikemukakan oleh Nurlia (2017) bahwa, “Tujuan pokok pengukuran kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai tujuan organisasi dan dalam memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar dapat mencapai hasil yang diinginkan. sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan individual dan kemampuan kolektif yang rasional. Pada dasarnya pengukuran kinerja keuangan dilakukan untuk tiga tujuan yaitu:

- 1) Untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah
- 2) Untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan
- 3) Untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Tujuan pengukuran kinerja adalah untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik untuk mengukur kinerja finansial dan non finansial secara tertimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strateginya.

### **c. Manfaat Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah**

Pengukuran kinerja mempunyai manfaat yang banyak bagi organisasi, secara umum manfaat pengukuran kinerja adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan menilai kinerja manajemen.
- 2) Menunjukkan arah pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.
- 3) Memonitor dan mengevaluasi kinerja dengan membandingkan skema kerja dan pelaksanaannya.
- 4) Membantu mengungkap dan memecahkan masalah yang ada.
- 5) Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
- 6) Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

### **d. Indikator Kinerja Keuangan Daerah**

Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah harus mencakup pengukuran Kinerja Keuangan. Hal ini terkait dengan tujuan organisasi Pemda. Menurut Mohamad Mahsun (2014) indikator Kinerja Keuangan Daerah meliputi:

- 1) Indikator Masukan (*Inputs*), misalnya:
  - a) Jumlah dana yang dibutuhkan.
  - b) Jumlah pegawai yang dibutuhkan.
  - c) Jumlah infra struktur yang ada.
  - d) Jumlah waktu yang digunakan.

- 2) Indikator Proses (*Process*), misalnya:
  - a) Ketaatan pada peraturan perundangan.
  - a) Rata-rata yang diperlukan untuk memproduksi atau menghasilkan layanan jasa.
- 3) Indikator Keluaran (*Output*), misalnya:
  - a) Jumlah produk atau jasa yang dihasilkan.
  - b) Ketepatan dalam memproduksi barang atau jasa.
- 4) Indikator Hasil (*Outcome*), misalnya:
  - a) Tingkat kualitas produk dan jasa yang dihasilkan.
  - b) Produktivitas para karyawan atau pegawai.
- 5) Indikator Manfaat (*Benefit*), misalnya:
  - a) Tingkat kepuasan masyarakat
  - b) Tingkat partisipasi masyarakat
- 6) Indikator *Impact*, misalnya:
  - a) Peningkatan kesejahteraan masyarakat.
  - b) Peningkatan pendapatan masyarakat.

#### **2.1.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

##### **a. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan cermin dari pilihan-pilihan ekonomis dan sosial masyarakat suatu daerah. Untuk menjalankan peran yang dimandatkan masyarakat untuk menjadikan pilihan-pilihan tersebut. Pemerintah daerah harus melaksanakan fungsi pertama, pengumpulan sumber daya yang mencukupi dengan cara yang tepat, dan kedua, pengalokasian dan penggunaan sumber daya tersebut secara responsif,

efisien dan efektif. Fungsi pertama berkaitan dengan sisi penerimaan (pendapatan) dari APBD sedangkan fungsi kedua dari sisi pengeluaran (belanja) (Nadaek, 2013).

Pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas menjalankan mandat dari rakyat membutuhkan biaya yang besar. Untuk pembiayaan tersebut pemerintah daerah mempunyai beberapa sumber penerimaan daerah yang dituangkan dalam anggaran. Anggaran yang dibuat akan mencerminkan politik pengeluaran pemerintah yang rasional baik secara kuantitatif maupun kualitatif sehingga akan terlihat (Mardiasmo, 2013):

- a) Adanya pertanggungjawaban pemungutan pajak dan pungutan lain-lain oleh pemerintah misalnya untuk memperlancar ekonomi.
- b) Adanya hubungan yang erat antara fasilitas penggunaan dana dan penarikannya.
- c) Adanya pola pengeluaran pemerintah yang dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam menentukan pola tingkat distribusi penghasilan dalam ekonomi.

Dibawah ini ditunjukkan beberapa pengertian APBD, antara lain:

- 1) Pengertian APBD menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Perimbangan keuangan antara pusat dan pemerintah daerah adalah, “Rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah”.
- 2) Pengertian APBD menurut Mamesah (2021) pada orde baru adalah, “Rencana operasional Keuangan Pemerintah Daerah, dimana disatu pihak

menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi- setingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu, dan dipihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran dimaksud”.

Definisi menurut Mamesah (2021) mengandung unsur:

- a) Rencana operasional daerah, yang menggambarkan adanya aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dimana aktivitas tersebut telah diuraikan secara rinci.
  - b) Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya yang ada merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan.
  - c) Dituangkan dalam bentuk angka, jenis kegiatan, dan jenis proyek.
  - d) Untuk keperluan satu tahun anggaran yaitu April sampai dengan Maret dan Januari sampai dengan Desember.
- 3) Pengertian APBD menurut Halim (2017) adalah, “Rencana kegiatan pemerintah daerah yang dituangkan dalam bentuk angka dan menunjukkan adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal dan biaya yang merupakan batas maksimal untuk suatu periode anggaran”.

**b. Karakteristik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Karakteristik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut Halim (2017), antara lain:

- 1) APBD disusun oleh DPRD bersama-sama Kepala Daerah.
- 2) Pendekatan yang dipakai dalam penyusunan anggaran adalah pendekatan tradisional (*line item*) yaitu anggaran disusun berdasarkan jenis penerimaan dan jenis pengeluaran. Oleh karena itu, setiap baris dalam APBD menunjukkan tiap jenis penerimaan dan pengeluaran. penggunaan pendekatan ini bertujuan untuk melakukan pengendalian atas pengeluaran. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang paling tradisional (tertua) diantara berbagai pendekatan penyusunan anggaran.
- 3) Siklus APBD terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemeriksaan, penyusunan, dan penetapan perhitungan APBD. Penyusunan dan perhitungan APBD merupakan pertanggungjawaban APBD. Pertanggungjawaban itu dilakukan dengan menyampaikan perhitungan APBD kepada Menteri Dalam Negeri untuk Pemerintahan Daerah Tingkat I dan kepada Gubernur untuk Pemerintahan Daerah Tingkat II. Oleh karena itu, pertanggungjawaban bersifat vertikal. Dalam tahap pengawasan dan pemeriksaan dan tahap penyusunan dan penentuan perhitungan APBD, pengendalian dan pemeriksaan/ audit bersifat keuangan. Hal ini tampak pada pengawasan pendapatan daerah dan pengawasan pengeluaran daerah.
- 4) Pengawasan terhadap pengeluaran daerah dilakukan berdasarkan 3 unsur utama, yaitu unsur ketaatan pada peraturan perundangan yang berlaku, unsur kehematan dan efisiensi, dan unsur hasil program (untuk proyek-proyek daerah).

- 5) Sistem akuntansi keuangan daerah menggunakan tata buku anggaran yaitu anggaran dan pembukuan saling berhubungan dan saling mempengaruhi.

**c. Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Fungsi Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) menurut Mamesah (2021), antara lain:

- 1) Menentukan jumlah pajak yang dibebankan pada rakyat daerah yang bersangkutan.
- 2) Merupakan suatu sarana untuk mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggungjawab.
- 3) Memberi isi dan arti kepada tanggung jawab Pemerintah Daerah umumnya dan kepada daerah khususnya, karena APBD itu menggambarkan seluruh kebijakan Pemerintah Daerah.
- 4) Merupakan suatu sarana untuk melaksanakan pengawasan terhadap daerah dengan cara yang lebih mudah dan berhasil guna.
- 5) Merupakan suatu pemberian kuasa kepada Kepala Daerah didalam batas-batas tertentu.

### **2.1.5 Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja**

#### **Daerah**

Kinerja dapat diartikan sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan. Kinerja keuangan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk melakukan penilaian kinerja, yaitu untuk menilai sukses atau tidaknya suatu organisasi, program atau kegiatan. Pengukuran kinerja merupakan suatu proses sistematis untuk menilai apakah program/kegiatan yang telah direncanakan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana tersebut, dan yang lebih penting adalah apakah telah mencapai keberhasilan yang telah ditargetkan pada saat perencanaan.

Menurut Helfert (1982) dalam Mohamad Mahsun (2014), “Analisis Laporan Keuangan merupakan alat yang digunakan dalam memahami masalah dan peluang yang terdapat dalam laporan keuangan”. Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta.

Kinerja keuangan merupakan gambaran prestasi yang dicapai perusahaan dalam kegiatan operasinya baik menyangkut aspek keuangan, aspek pemasaran, aspek penghimpun dana dan penyaluran dana, aspek teknologi, maupun sumber daya manusianya. Indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung, yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur



finansial dan nonfinansial. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud, yaitu:

- a) Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik.
- b) Ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan.
- c) Ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Ukuran kinerja digunakan untuk menentukan kelayakan biaya pelayanan yang dibebankan kepada masyarakat pengguna jasa publik. masyarakat tentu tidak mau terus menerus ditarik pungutan sementara pelayanan yang mereka terima tidak ada peningkatan kualitas dan kuantitasnya. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.

Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kiadah pengukurannya. Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta.

Analisis rasio keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga

dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun yang potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan pada APBD ini adalah sebagai berikut: DPRD, pihak eksekutif, pemerintah pusat/provinsi, serta masyarakat dan kreditor.

Berdasarkan informasi pada Laporan Realisasi Anggaran, kita dapat membuat analisis anggaran khususnya analisis belanja antara lain berupa Analisis Varians Belanja, Analisis Pertumbuhan Belanja, Analisis Keserasian Belanja dan Rasio Efisiensi Belanja.

Dengan melihat kinerja belanja, maka dapat dilihat kinerja APBD secara umum. Jika semua kinerja tersebut menunjukkan pencapaian angka yang sudah ditargetkan, maka dapat dikatakan bahwa kinerja APBD adalah baik.

### 1) **Kemandirian Keuangan Daerah**

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan restribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan masyarakat. Adapun rumusnya sebagai berikut:

$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Penerimaan Pusat/ Provinsi dan Pinjaman}} \times 100\%$
--

*Sumber: Halim (2017)*

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan dengan daerah terhadap sumber dana ekstem. Semakin tinggi rasio kemandirian juga menggambarkan

tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat membayar pajak dan redistribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi (Halim, 2017).

**Tabel 2.1 Kriteria Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

<b>Nilai Rasio (%)</b>	<b>Kemandirian</b>	<b>Pola Hubungan</b>
0 - 25	Sangat Rendah	Instruktif
25 - 50	Rendah	Konsultatif
50 - 75	Sedang	Partisipatif
75 - 100	Tinggi	Delegatif

*Sumber: Kemenkeu.go.id*

## 2) Efektivitas PAD

Pengertian efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (Mardiasmo, 2013). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Maka didalam proses penganggaran mulai diarahkan untuk berorientasikan pada keluaran (*output*) dan dampak (*outcome*) melalui pengukuran efektivitas.

Analisis efektivitas pengelolaan anggaran daerah dimaksudkan untuk mengetahui berhasil tidaknya suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan apakah telah mencapai tujuan yang ditetapkan. Analisis yang dilakukan terhadap kinerja keuangan daerah dengan menggunakan ukuran tingkat efektivitas yaitu perbandingan antara realisasi pendapatan dengan total anggaran pendapatan daerah dikalikan seratus dalam bentuk persentase (Mahsun, 2014). Rumus untuk mengukur kinerjanya adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Sumber: Mahsun (2014)

Dengan mengetahui hasil perbandingan antara realisasi pendapatan dan anggaran pendapatan menggunakan ukuran efektivitas tersebut dapat diketahui kinerja keuangan daerah. Adapun kriteria penilaian kinerja yang diukur sebagai berikut:

**Tabel 2.2 Kriteria Penilaian Efektivitas PAD**

<b>Realisasi Belanja Langsung Terhadap Anggaran Belanja</b>	<b>Kriteria Keserasian Belanja</b>
< 60%	Sangat Efektif
60% - 80%	Efektif
81% - 90%	Cukup Efektif
91% - 100%	Kurang Efektif
> 100%	Tidak Efektif

Sumber: Kemenkeu.go.id

### 3) Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%, sebaliknya jika lebih maka mengindikasikan telah terjadi pemborosan anggaran.

Rumusan pengukuran kinerjanya menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Sumber: Mahsun (2014)

Semakin kecil nilai rasio ini maka semakin efisien kinerja pemerintah daerah dalam melakukan anggaran belanja daerah. Secara umum, nilai efisiensi dalam dikategorikan sebagai berikut:

**Tabel 2.3 Kriteria Penilaian Efisiensi Belanja**

<b>Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja</b>	<b>Kriteria Keserasian Belanja</b>
< 60%	Sangat Efisien
60% - 80%	Efisien
81% - 90%	Cukup Efisien
91% - 100%	Kurang Efisien
> 100%	Tidak Efisien

Sumber: Kemenkeu.go.id

#### 4) Keserasian Keuangan Daerah

Rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasional dan belanja modal secara optimal (Halim, 2017). Adapun rumusnya adalah:

$$\text{Rasio Belanja Operasional} = \frac{\text{Total Belanja Operasional}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

Sumber: Halim (2017)

$$\text{Belanja Modal Terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

Sumber: Halim (2017)

Kemampuan suatu daerah dikatakan baik apabila total belanja modal lebih besar dari total belanja operasional;. Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya rasio belanja operasional maupun modal terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan.

**Tabel 2.4 Kriteria Penilaian Keserasian Belanja Daerah**

<b>Realisasi Belanja Operasional Terhadap Anggaran Belanja Modal</b>	<b>Kriteria Keserasian Belanja</b>
0 – 20	Tidak Serasi
> 20 – 40	Kurang Serasi
> 40 – 60	Cukup Serasi
> 60 – 80	Serasi
> 80 – 100	Sangat Serasi

Sumber: Kemenkeu.go.id

## 5) Pertumbuhan PAD

Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggaran mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif (Mahmudi, 2014). Rasio ini mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian (Halim, 2017). Rumus untuk menghitung Rasio Pertumbuhan adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{Total PAD pada tahun ke-n}}{\text{Total PAD pada tahun ke-0}} \times 100\%$$

*Sumber: Halim (2017)*

Rasio Pertumbuhan berfungsi untuk mengevaluasi potensi-potensi daerah yang perlu mendapatkan perhatian. Semakin tinggi nilai Total Pendapatan Daerah (TPD), PAD, dan Belanja Modal yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Operasi, maka pertumbuhannya adalah positif. Artinya bahwa daerah yang bersangkutan telah mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode satu ke periode berikutnya. Jika semakin tinggi nilai TPD, PAD, dan Belanja Operasi yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Modal, maka pertumbuhannya adalah negatif. Artinya bahwa daerah belum mampu meningkatkan pertumbuhan daerahnya.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai Analisis Anggaran kinerja sektor publik sebelumnya sudah pernah dilakukan. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menjadi landasan peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu**

No	Nama/ Tahun	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Lilis Atmawati (2013)	Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Rasio Keuangan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)	Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Aktivitas, Rasio Pertumbuhan dan Kinerja Keuangan Daerah	Hasil analisis menunjukkan bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) untuk rasio kemandirian sudah cukup memadai dimana tahun 2008 sebesar 3,86%, dan tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar 4,50%, ini berarti menggambarkan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) bisa dinilai cukup mandiri, kemudian pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 selalu mengalami peningkatan.
2.	Karamoy (2015)	Analisis Kinerja realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah kota tomohon tahun anggaran 2011-2013	Kinerja Pemerintah Kota Tomohon, Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Pemerintah Kota Tomohon Tahun anggaran 2011-2013	Kinerja pendapatan dari pemerintah kota Tomohon cukup baik, yang dapat dilihat dari realisasi pendapatan tahun 2012 dan 2013 sudah melebihi target kecuali pendapatan pada tahun 2011 yang tidak memenuhi target
3.	Mubin Fauzil (2017)	Analisis Kinerja Keuangan Dinas pendapatan Daerah (Dispenda) dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang	Kineja Keuangan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) kota Malang dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Malang	1. Kinerja DISPENDA dalam rangka meningkatkan PAD di kota Malang sudah baik 2. Pada rasio efektivitas menunjukkan peningkatan setiap tahunnya 3. Rasio kemandirian mengalami fluktuasi dengan rata-rata sebesar 15.05% artinya kemandirian PAD kota Malang tinggi. 4. Rasio pertumbuhan mengalami pertumbuhan secara positif 5. Rasio kontribusi PAD kota Malang 2010-2012 secara keseluruhan mengalami kenaikan
4.	Apri Diana Eka Ayu (2017)	Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah ( Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Dan Aset Kabupaten	Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Aktivitas, Rasio Pertumbuhan, dan Kinerja Keuangan Daerah	Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek dilihat dari (1) Rasio kemandirian daerah sangat baik dalam menjalankan tugas –tugas pemerintahan, pelayanan, dan pembangunan, karena hasil rata – rata kemandiriannya sebesar 245,61%, (2) Rasio efektivitas dapat dikategorikan

		Trenggalek Tahun Anggaran 2012 – 2015)		efektif, karena hasil rata – rata efektivitasnya 99,20%, (3) Rasio Efisiensi daerah tergolong Sangat Efisien karena rata – rata besarnya rasio ini sebesar 1,04%, (4) Rasio Keserasian dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Trenggalek mengalokasikan sebagian besar anggaran belanjanya untuk belanja operasi daerah rata-rata yaitu sebesar 85,33 dibandingkan dengan rata-rata belanja modal sebesar 14,64%, (5) Rasio Pertumbuhan PAD, Belanja Operasi, belanja pertumbuhan, hasil rata – rata menunjukkan pertumbuhan positif yang artinya sangat baik.
5.	Kelfani (2019)	Analisis Anggaran Kinerja Sektor Publik Pada Dinas Perhubungan Kota Palembang	Analisis Anggaran Kinerja Sektor Publik	Target dan realisasi anggaran kinerja sektor publik masih rendah daripada target yang sudah ditetapkan. Namun ada beberapa kendala yang dihadapi dalam dinas perhubungan kota Palembang misalnya ada beberapa target pendapatan kurang efektif, hal ini disebabkan penurunan terhadap retribusi, sedangkan tidak efisien itu dikarenakan belanja modal dan belanja operasi dinas perhubungan kota palembang tidak sesuai dengan realisasi pendapatan.

*Sumber: Diolah Peneliti (2023)*

### 2.3 Kerangka Konseptual

Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi merupakan salah satu tolak ukur pencapaian kinerja ataupun hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan anggaran dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran.

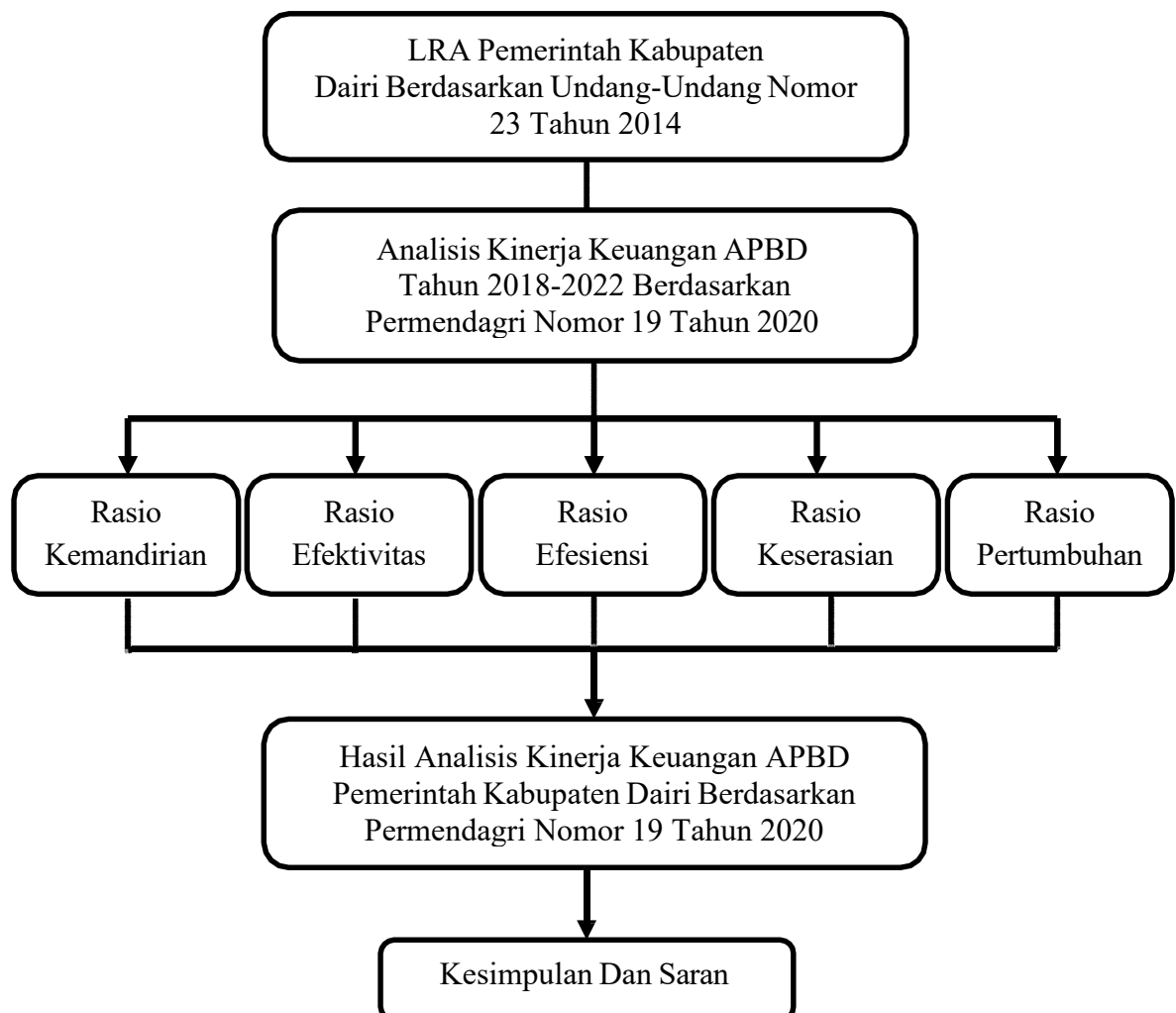
Penilaian kinerja pemerintah sangat penting dilakukan oleh pemerintahan, karena dengan mengetahui kinerja keuangan maka dapat dijadikan pihak manajemen dalam pengambilan keputusan keuangan, terutama melalui analisis rasio kemandirian keuangan daerah, efektivitas PAD, efisiensi PAD, keserasian keuangan daerah dan pertumbuhan PAD. Karena sesuai dengan konsep anggaran mengindikasikan beban kerja, yakni semakin besar anggaran menunjukkan



semakin besar pula beban kerja organisasi, begitu juga sebaliknya, program atau kegiatan merupakan *output* atau hasil kerja dan organisasi pemerintahan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu dan masyarakat umum. Oleh karenanya pengalokasian anggaran sangat terkait dengan kinerja organisasi pemerintahan dalam mencapai tujuannya.

Sesuai dengan pemaparan di atas, maka peneliti mencoba untuk menyusun kerangka konseptual dalam penelitian ini sebagai berikut:

**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**



*Sumber: Diolah Peneliti (2023)*

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian asosiatif bersifat deskriptif, yang artinya peneliti mendeskripsikan data yang diterima dan dikumpulkan dari Pemerintah Kabupaten Dairi untuk membuat suatu kesimpulan secara umum.

Metode deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan data yang dikumpulkan, dan tidak dimaksudkan untuk membuat kesimpulan atau generalisasi secara umum (Sugiyono, 2014).

#### **3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **3.2.1 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja No. 127, Kota Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, 22218.

##### **3.2.2 Waktu Penelitian**

Jadwal penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan Mei 2023 dan akan selesai sesuai dengan waktunya. Jadwal penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.1 Jadwal Penelitian**

No	Kegiatan	Tahun							
		Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Nov	April	
		2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	
1	Pengajuan Judul								
2	Penyusunan Proposal								
3	Seminar Proposal								
4	Perbaikan/Acc Proposal								
5	Pengolahan Data								
6	Penyusunan Skripsi								
7	Bimbingan Skripsi								
8	Seminar Hasil								
9	Sidang Meja Hijau								

*Sumber: Diolah Peneliti (2023)*

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

#### 3.3.1 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang bersifat kuantitatif. Data kuantitatif sendiri merupakan data informasi yang dapat diukur/numerik. Data penelitian ini berupa data laporan keuangan yang dipublikasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi selama tahun 2018-2022.

#### 3.3.2 Sumber Data

Sugiyono (2014), data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerinta Kabupaten Dairi selama tahun 2018-2022. Selain itu, sumber data penelitian dapat diperoleh melalui internet, buku-buku, jurnal, artikel, dan lainnya.

### 3.4. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

#### 3.4.1 Variabel Penelitian

Variabel adalah suatu atribut atau sifat nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, Sugiyono (2014). Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah variabel tunggal yaitu mengenai pembahasan anggaran kinerja keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Dairi.

#### 3.4.2 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah suatu usaha untuk melakukan pendeskripsian terhadap variabel satu yang berpengaruh terhadap variabel lain yang diamati dengan menggunakan pengukuran skala data interval dan skala data rasio yang dipilih peneliti untuk menentukan hubungan variabel dengan suatu gejala yang akan diobservasi.

**Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel**

No	Variabel	Definisi	Indikator	Skala
1	Rasio Kemandirian	Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan masyarakat. (Halim, 2017)	$\frac{\text{PAD}}{\text{Bantuan Penerimaan Pusat/Provinsi}}$	Rasio
2	Rasio Efektivitas	Analisis efektivitas pengelolaan anggaran daerah dimaksudkan untuk mengetahui berhasil tidaknya suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan apakah telah mencapai tujuan yang ditetapkan. (Mahsun, 2016)	$\frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}}$	Rasio
3	Rasio Efisiensi	Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja.	$\frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}}$	Rasio

		Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. (Mahsun, 2016)		
4	Rasio Keserasian	Rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. (Halim, 2017)	$\frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}}$	Rasio
5	Rasio Pertumbuhan	Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggaran mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif. (Mahmudi, 2014)	$\frac{\text{Total PAD ke-n}}{\text{Total PAD ke-0}}$	Rasio
6	Kinerja Keuangan	Tingkat capaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam mengelola keuangannya. (Kasmir, 2016)	Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Keserasian dan Rasio Pertumbuhan	Rasio

Sumber: Diolah Peneliti (2023)

### 3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan faktor penting demi keberhasilan penelitian. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara mengumpulkan data, siapa sumbernya, dan apa alat yang digunakan. Jenis sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh. Apakah data diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau data diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder).

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Teknik menunjuk suatu cara sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi dan sebagainya. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah:

### 1) **Observasi**

Observasi adalah aktivitas suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan-pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan studi penelitian. Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan melihat analisis rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi PAD, rasio keserasian keuangan daerah dan rasio pertumbuhan PAD pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Dairi.

### 2) **Dokumentasi**

Observasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kinerja keuangan daerah terutama terkait rasio keuangan pemerintahan yaitu, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi PAD, rasio keserasian keuangan daerah dan rasio pertumbuhan PAD yang dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Dairi.

## **3.6 Teknik Analisis Data**

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yang didasarkan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yakni dengan konsep anggaran khususnya analisis pendapatan dan belanja. Analisis deskriptif adalah suatu kegiatan untuk menyusun, mengklasifikasi, mengklasifikasi,

menafsirkan serta menyimpulkan data sehingga memberikan suatu gambaran tentang masalah yang dihadapi atau yang diteliti. Analisis keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi.

Langkah-langkah yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan observasi terhadap kinerja keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Dairi yang dilihat dari APBD dengan menggunakan metode analisis rasio keuangan.
- 2) Mengumpulkan data-data hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yaitu Laporan Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 3) Setelah semua data-data terkumpul secara baik maka penulis akan melakukan perhitungan dari masing-masing rasio keuangan, seperti:

#### **a) Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan restribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan masyarakat.

$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Penerimaan Pusat/ Provinsi dan Pinjaman}} \times 100\%$
--

*Sumber: Halim, (2017)*

#### **b) Analisis Rasio Efektivitas PAD**

Analisis efektivitas pengelolaan anggaran daerah dimaksudkan untuk mengetahui berhasil tidaknya suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan apakah telah mencapai tujuan yang ditetapkan. Analisis

yang dilakukan terhadap kinerja keuangan daerah dengan menggunakan ukuran tingkat efektivitas yaitu perbandingan antara realisasi pendapatan dengan total anggaran pendapatan daerah dikalikan seratus dalam bentuk persentase (Mahsun, 2016). Rumus untuk mengukur kinerjanya adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

*Sumber: Mahsun, (2016)*

### c) Analisis Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%, sebaliknya jika lebih maka mengindikasikan telah terjadi pemborosan anggaran. Berikut adalah rumusnya:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

*Sumber: Mahsun, (2016)*

### d) Analisis Rasio Kekeragaman Keuangan Daerah

Rasio keragaman menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Rumus menghitung rasio keragaman keuangan daerah sebagai berikut:



$$\text{Rasio Belanja Operasional} = \frac{\text{Total Belanja Operasional}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

*Sumber: Halim, (2017)*

#### **e) Analisis Rasio Pertumbuhan PAD**

Tingkat capaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam mengelola keuangannya.

Rumus menghitung rasio pertumbuhan PAD sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{Total PAD pada tahun ke-n}}{\text{Total PAD pada tahun ke-0}} \times 100\%$$

*Sumber: Halim, (2017)*

- 4) Setelah melakukan analisis kinerja keuangan daerah dengan rasio keuangan, maka akan didapati hasil dari analisis. Selanjutnya penulis akan melakukan pengamatan lebih lanjut.
- 5) Melakukan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah.
- 6) Hal terakhir adalah menentukan kesimpulan dan saran dari hasil temuan penelitian yang sudah dilakukan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

##### **4.1.1 Gambaran Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi**

Kabupaten Dairi merupakan salah satu kabupaten/kota yang ada di Sumatera Utara dengan keadaan alam yang berbukit-bukit dan keadaan jalan yang sempit dan terjal. Kabupaten Dairi terdiri dari 15 kecamatan, 161 desa dan 8 kelurahan, diantara desa tersebut terdapat 96 desa yang terkategori desa tertinggal dimana jauh dari jangkauan pelayanan fasilitas umum seperti media baca dan lain-lain.

Kabupaten Dairi terletak di bagian barat daya Kabupaten Dairi dengan luas wilayah 191.625 Ha. Secara astronomis terbentang antara 98000' – 98030' BT dan 2015'-3' LU. Topologi tanahnya sangat variatif, berbukit dan bergelombang yang berbatasan dengan:

Sebelah Utara: Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi NAD dan Kabupaten Karo

Sebelah Timur: Kabupaten Samosir,

Sebelah Selatan: Pak-pak Bharat,

Sebelah Barat: Kabupateen Aceh Selatan Provinsi NAD.

Wilayah Kabupaten Dairi sebahagian besar merupakan dataran tinggi dengan variasi ketinggian rata-rata antara 700– 1.250 m diatas permukaan laut.

Iklim Tropis pada ketinggian kurang dari 500 m di atas permukaan laut, iklim sub tropis pada daerah dengan ketinggian 400 – 1.360 m di atas permukaan laut dan

iklim dingin pada daerah ketinggian 1.000 m di atas permukaan laut. Penduduk yang bermukim di wilayah Kabupaten Dairi sifatnya heterogen meliputi suku pak-pak, toba, karo, simalungun, mandailing dan sebagian kecil suku nias, minangkabau, cina, jawa, aceh dan lain-lain.

Berdasarkan keadaan alam dan topografi Kabupaten Dairi maka sektor pertanian merupakan potensi terbesar mendukung perekonomian masyarakat. Mata pencaharian penduduk mayoritas adalah bertani/berkebun, beternak ikan kolam, keramba maupun tambak, dan pengusaha ternak/unggas. Persentase terbesar merupakan rumah tangga tani pengguna lahan sebesar 99,86 persen dengan produksi jenis tanaman yaitu tanaman padi dan palawija, tanaman perkebunan rakyat dan hortikultura sebagai Sumber mata pencaharian penduduk yang utama.

Kabupaten Dairi memiliki berbagai potensi yang dapat dimanfaatkan seperti potensi lahan, potensi sungai seperti Lae Sibellin dan Lau Renun, potensi bahan tambang seperti pertambangan galian C dan bahan tambang emas, potensi industri, potensi danau dan potensi pariwisata.

Sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pengelolaan keuangan dan asset, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan keuangan dan asset. Adapun fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;

- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah.

#### 4.1.2 Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Suatu daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan restribusi sebagai sumber pendapatan daerah yang diperlukan daerah. Rasio ini menggambarkan ketergantungan daerah terhadap dana eksteren dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Kemandirian Keuangan Daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat atau pinjaman dari luar.

**Tabel 4.1 Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2018-2022**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Bantuan Pemerintah Pusat dan Pinjaman (Rp)	Rasio Kemandirian (%)	Kategori
2018	98.515.273.851,97	121.028.560.309,33	81%	Delegatif
2019	106.410.053.810,21	128.143.082.781,72	83%	Delegatif
2020	118.058.491.717,40	128.414.918.246,00	92%	Delegatif
2021	137.222.874.687,17	70.868.964.197,23	93%	Delegatif
2022	138.048.354.142,71	122.529.140.025,40	112%	Delegatif

Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2023)

Dari hasil di atas, dapat dijelaskan hasil perhitungan rasio kemandirian sebagai berikut:

1. Tahun 2018 tingkat rasio kemandirian berada di angka 81% dengan jumlah PAD sebesar Rp. 98.515.273.851,97 dan bantuan pemerintah pusat dan pinjaman sebesar Rp. 121.028.560.309,33. Hasil perhitungan rasio kemandirian di tahun 2018 terbilang cukup baik dengan pola hubungan delegatif.
2. Tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 83% dengan jumlah PAD sebesar Rp. 106.410.053.810,21 dan bantuan pemerintah pusat dan pinjaman sebesar Rp. 128.143.082.781,72. Hasil perhitungan rasio kemandirian di tahun 2019 terbilang cukup baik dengan pola hubungan delegatif.
3. Tahun 2020 tingkat rasio kemandirian mengalami peningkatan kembali menjadi 92% dengan jumlah PAD sebesar Rp. 118.058.491.717,40 dan bantuan pemerintah pusat dan pinjaman Rp. 128.414.918.246,00. Hasil perhitungan rasio kemandirian di tahun 2020 terbilang cukup baik dengan pola hubungan delegatif.
4. Tahun 2021 tingkat rasio kemandirian mengalami kenaikan menjadi 93% dengan jumlah PAD sebesar Rp. 137.222.874.687,17 dan bantuan pemerintah pusat dan pinjaman sebesar Rp. 70.868.964.197,23. Hasil perhitungan rasio kemandirian di tahun 2021 terbilang cukup baik dengan pola hubungan delegatif.
5. Tahun 2022 mengalami kenaikan yang cukup signifikan menjadi 112% dengan jumlah PAD sebesar Rp. 138.048.354.142,71 dan bantuan pemerintah pusat dan pinjaman sebesar Rp. 122.529.140.025,40. Hasil perhitungan rasio kemandirian di tahun 2022 terbilang sangat baik dengan pola hubungan delegatif.

### 4.1.3 Analisis Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan, dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi *rill* daerah.

**Tabel 4.2 Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2018-2022**

Tahun	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)	Target Penerimaan Daerah (Rp)	Rasio Efektivitas (%)	Kategori
2018	98.515.273.851,97	97.520.914.287,68	101%	Sangat Efektif
2019	106.410.053.810,21	116.519.037.265,60	90%	Cukup Efektif
2020	118.058.491.717,40	95.857.330.740,00	123%	Efektif
2021	137.222.874.687,17	120.868.964.197,23	113%	Kurang Efektif
2022	138.048.354.142,71	142.529.140.025,40	96%	Kurang Efektif

Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2023)

Berdasarkan hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel 4.2 dapat digambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi *rill* daerah (efektivitas).

Dari hasil perhitungan rasio efektivitas di atas maka dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tahun 2018 tingkat rasio efektivitas yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi sebesar 101%. Hal itu ditunjukkan dengan realisasi lebih besar dibandingkan dengan target sehingga dapat dikatakan tidak efektif.
2. Tahun 2019 tingkat rasio efektivitas Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi sebesar 90%. Hal itu terlihat dengan target lebih besar dibandingkan realisasi sehingga dapat dikatakan cukup efektif.

3. Tahun 2020 tingkat rasio efektivitas Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi 123%. Hal itu ditunjukkan dengan realisasi lebih besar dibandingkan dengan target sehingga dapat dikatakan tidak efektif.
4. Tahun 2021 tingkat rasio efektivitas Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi sebesar 113%. Hal itu ditunjukkan dengan realisasi lebih besar dibandingkan dengan target sehingga dapat dikatakan tidak efektif.
5. Tahun 2022 tingkat rasio efektivitas Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi sebesar 96%. Hal itu ditunjukkan dengan realisasi lebih besar dibandingkan dengan target sehingga dapat dikatakan cukup efektif.

Untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal, rasio efektifitas Pendapatan Asli Daerah perlu disandingkan dengan rasio efisiensi Pendapatan Asli Daerah yang dicapai pemerintah daerah. Rasio ini menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 (seratus) persen. Semakin kecil rasio efektivitas berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik.

#### **4.1.4 Analisis Rasio Efisiensi PAD**

Rasio efisiensi merupakan rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendaoatan yang diterima.

**Tabel 4.3 Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2018-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Belanja Daerah (%)</b>	<b>Target Belanja Daerah (%)</b>	<b>Rasio Efisiensi (%)</b>	<b>Kategori</b>
2018	1.105.051.440.542,58	1.119.621.517.914,97	98%	Kurang Efisien
2019	1.157.789.251.487,93	1.158.061.086.952,21	99%	Kurang Efisien
2020	1.251.702.935.123,17	1.198.957.368.508,40	104%	Tidak Efisien
2021	1.190.043.052.154,00	1.202.630.009.618,17	98%	Kurang Efisien
2022	1.237.857.086.076,33	1.208.784.276.096,71	102%	Tidak Efisien

*Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2023)*

Sesuai dengan hasil perhitungan dari tabel 4.3 maka perhitungan rasio efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi dari tahun 2018 sampai dengan 2022 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tahun 2018 tingkat rasio efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi sebesar 98%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa target belanja Pemerintah lebih besar dibandingkan realisasi belanja sehingga dapat dikatakan kurang efisien.
2. Tahun 2019 tingkat rasio efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi sebesar 99%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa target belanja Pemerintah lebih besar dibandingkan realisasi, sehingga dapat dikatakan kurang efisien.
3. Tahun 2020 tingkat rasio efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi sebesar 104%. Hasil tersebut menunjukkan target belanja Pemerintah lebih besar dibandingkan realisasi sehingga dapat dikatakan tidak efektif.
4. Tahun 2021 tingkat efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi sebesar 98%. Hal itu membuktikan bahwa target belanja Pemerintah lebih besar dibandingkan realisasi sehingga dapat dikatakan kurang efektif.
5. Tahun 2022 tingkat efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi sebesar 102%. Hal itu membuktikan bahwa target belanja Pemerintah Daerah



Kabupaten Dairi lebih besar dibandingkan realisasi sehingga dapat dikatakan tidak efisien.

Artinya, dengan mengeluarkan biaya yang relatif sedikit, pemerintah daerah dapat menghasilkan *output* (hasil) yang optimal dan memberikan penggambaran kinerja pemerintah daerah yang baik.

#### 4.1.5 Analisis Rasio Kecerasan Keuangan Daerah

Rasio kecerasan menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal (Halim, 2017).

**Tabel 4.4 Hasil Perhitungan Rasio Kecerasan Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2018-2022**

Tahun	Rasio Belanja Rutin Terhadap APBD	Rasio Belanja Pembangunan Terhadap APBD
2018	11,21%	1,22%
2019	10,88%	1,20%
2020	10,60%	1,08%
2021	8,67%	0,51%
2022	8,96%	0,88%

*Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2023)*

Dari hasil perhitungan rasio kecerasan pada tabel 4.4 di atas, maka dapat diketahui bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Secara teori, jika presentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti presentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil (Halim, 2017).

Sejauh ini, belum ada patokan yang pasti berapa besarnya rasio belanja rutin maupun pembangunan terhadap APBD yang ideal. Hal itu dipengaruhi oleh

dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan.

Dari hasil didapati bahwa, sebagian besar dana yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi diprioritaskan untuk pemenuhan belanja rutin, sehingga rasio belanja pembangunan terhadap APBD masih relatif kecil. Seharusnya pemerintah daerah lebih memperhatikan sektor pembangunan yang mempunyai *multiplier effect* yaitu proses yang menunjukkan sejauh mana pendapatan nasional akan berubah efek dari perubahan dalam pengeluaran agregat. *Multiplier effect* bertujuan untuk menrangkan pengaruh dari kenaikan atau kemerosotan dalam pengeluaran agregat ke atas tingkat keseimbangan dan terutama ke atas tingkat pendapatan nasional, dan pengaruh langsung terhadap peningkatan pendapatan daerah.

Tingkat persentase rasio belanja rutin terhadap APBD dari tahun 2018 sampai dengan 2022 cenderung menurun. Kemudian tingkat persentase rasio belanja pembangunan terhadap APBD juga mengalami hal yang sama yaitu cenderung menurun.

Ini artinya Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi masih dominan dengan belanja kebutuhan aparatur pemerintah daerah (belanja rutin). Pemerintah daerah belum sepenuhnya mengalihkan fokus aktifitas wilayah pemerintahnya agar mengarah kepada belanja pembangunan yang tentunya ini akan memberikan dampak kepada usaha peningkatan pendapatan daerah dari segi pembangunan daerah.

Aktivitas wilayah merupakan rangkaian kegiatan yang tidak terpisahkan dari pengembangan dan pembangunan wilayah dan merupakan suatu

pengembangan yang terpadu dengan memanfaatkan keterkaitan antar sektor yang membentuk struktur ruang wilayah. Wilayah sebagai wadah kegiatan ekonomi memiliki peran penting bagi wilayahnya sendiri maupun daerah disekitar wilayah. Memahami sistem aktivitas wilayah, pola perilaku manusia merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan wilayah, yaitu sistem kegiatan yang menyangkut hubungan yang lebih kompleks dengan berbagai sistem kegiatan yang lain, baik dengan perorangan, kelompok dan lembaga.

#### 4.1.6 Analisis Rasio Pertumbuhan PAD

Rasio pertumbuhan dapat mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya (Mahmudi, 2014). Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian.

**Tabel 4.5 Hasil Perhitungan Rasio Pertumbuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2018-2022**

Tahun	PAD Tahun ke n	PAD Tahun ke 0	Rasio Pertumbuhan
2017/2018	96.133.794.210,47	98.515.273.851,97	97,58%
2018/2019	98.515.273.851,97	106.410.053.810,21	92,58%
2019/2020	106.410.053.810,21	118.058.491.717,40	90,13%
2020/2021	118.058.491.717,40	137.222.874.687,17	86,03%
2021/2022	137.222.874.687,17	138.048.354.142,71	99,40%

Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2023)

Hasil perhitungan pada tabel 4.5 di atas, menunjukkan bahwa, rasio pertumbuhan pada tahun 2017/2018 sebesar 97,58%, tahun 2018/2019 terdapat penurunan menjadi 92,58%, tahun 2019/2020 turun kembali menjadi 90,13%,

kemudian di tahun 2020/2021 mengalami penurunan kembali menjadi 86,03%, dan tahun 2021/2022 mengalami kenaikan menjadi 99,40%.

Berdasarkan hasil perhitungan, diketahui bahwa pertumbuhan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi belum begitu baik karena beberapa tahun selalu mengalami penurunan. Tetapi di tahun 2022 mulai mengalami peningkatan kembali.

Pertumbuhan suatu daerah dapat dikatakan baik jika pemerintah daerah dapat mengefesiesikan biaya yang dikeluarkan untuk belanja rutin dan mengefektifkan penggunaan pendapatan yang diperoleh daerah untuk sektor pembangunan yang dapat mendukung peningkatan penerimaan PAD.

Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi harus optimis untuk selalu menaikkan pertumbuhan ekonomi, terutama diharapkan dari beberapa sektor dominan seperti, perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan serta perdagangan dan jasa. Dari sektor tersebut dapat menunjukkan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari sebelumnya. Hal ini menjadi komitmen pemerintah daerah yang sangat kuat untuk menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif dan terbuka, sehingga menjadi daya tarik para investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Dairi.

## **4.2 Pembahasan**

Kajian Penelitian ini berkaitan dengan teori *stewardship*. Dimana *stewardship* merupakan situasi dimana para pimpinan tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan kepada hasil utama untuk kepentingan organisasi.

Dalam hal ini Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah hasil yang mudah diambil bagi pihak eksternal yang dianggap baik dari kepentingan penilaian anggaran. Sesuai dengan teori *stewardship* LRA akan memberikan informasi dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai organisasi dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan komparatif. Biaya juga berperan penting dalam perhitungan harga pokok, perencanaan, dan pengendalian.

Sesuai dengan hasil analisis yang dilakukan peneliti, maka peneliti akan membahas lebih lanjut terkait kinerja pemerintah yang dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi PAD, rasio keserasian keuangan daerah, dan rasio pertumbuhan PAD. berikut adalah keterangan dari hasil penelitian:

### **1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Kemandirian keuangan daerah Kabupaten Dairi dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat belum cukup memadai. Hal tersebut menggambarkan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Dairi belum cukup mandiri. Seperti yang terlihat bahwa, dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan tetapi bantuan dari pemerintah pusat lebih besar dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Daerah.

Rasio kemandirian keuangan daerah juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah,

semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Apri (2017) yang menyatakan bahwa, kinerja keuangan daerah Kabupaten Trenggalek dilihat dari rasio kemandirian daerah sudah sangat baik dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Hal ini berbanding lurus dengan temuan penelitian yang menunjukkan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi sudah sangat baik dilihat dari tahun 2018-2022.

## **2. Rasio Efektivitas PAD**

Rasio efektivitas PAD Kabupaten Dairi terbilang cenderung tidak efektif dari tahun 2018 sampai dengan 2022. Hal tersebut dibuktikan dengan tingkat persentasi rasio efektivitas yang berada diatas 100%. Rasio ini menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 (seratus) persen.

Rasio efektivitas merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah dalam suatu daerah dalam mewujudkan realisasi pada pendapatan daerahnya sendiri kemudian selanjutnya akan dibagi dengan anggaran yang telah ditentukan dalam potensi nyata dalam suatu daerah.

Pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan melihat hasil kerja yang dicapai oleh suatu organisasi. Efektivitas dapat diukur melalui berhasil tidaknya

suatu organisasi mencapai tujuan-tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Mubin (2017) yang menyatakan bahwa, kinerja keuangan daerah DISPENDA Kota Malang dilihat dari rasio efektivitas sudah efektif. Hal ini membuktikan tidak selarasnya dengan hasil temuan penelitian ini yang menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi belum efektif dalam menjalankan setiap tugasnya selama tahun 2018 sampai dengan 2022.

### **3. Rasio Efisiensi Belanja**

Hasil analisis rasio efisiensi Belanja Kabupaten Dairi dari tahun 2018 sampai dengan 2022 menunjukkan hasil yang kurang maksimal dan belum efisien. Hal ini menegaskan bahwa, kinerja pemerintahan daerah didalam memungut PAD belum efisien karena rata-rata rasio menunjukkan hasil diatas 100% beberapa tahun terakhir.

Rasio efisiensi Belanja menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja Keuangan pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100%. Semakin kecil Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berarti Kinerja Keuangan pemerintah daerah semakin baik. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung

secara cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan Apri (2017) yang menemukan bahwa kinerja keuangan daerah Kabupaten Trenggalek sudah sangat efisien. Pernyataan tersebut menunjukkan tidak selarasnya dengan temuan penelitian ini yang menunjukkan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi dilihat dari rasio efisiensi belum efisien selama tahun 2018-2022.

#### **4. Rasio Keserasian Keuangan Daerah**

Dari hasil analisis diketahui bahwa, tingkat persentase rasio belanja rutin terhadap APBD dari tahun 2018 sampai dengan 2022 cenderung menurun. Kemudian tingkat persentase rasio belanja pembangunan terhadap APBD juga mengalami hal yang sama yaitu cenderung menurun.

Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi masih dominan dengan belanja kebutuhan aparatur pemerintah daerah (belanja rutin). Pemerintah daerah belum sepenuhnya mengalihkan fokus aktifitas wilayah pemerintahnya agar mengarah kepada belanja pembangunan yang tentunya ini akan memberikan dampak kepada usaha peningkatan pendapatan daerah dari segi pembangunan daerah.

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Rutin dan Belanja Pembangunannya secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk Belanja Rutin berarti persentase Belanja investasi (Belanja



Pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

Belanja Operasi merupakan perbandingan antara total Belanja Operasi dengan Total Belanja Daerah. Rasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk Belanja operasi. Belanja Operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin dan berulang.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil temuan Kelfani (2019) yang menyatakan rasio keserasian pada Dinas Perhubungan Palembang mengalokasikan sebagian besar anggaran belanjanya untuk belanja operasi daerah. Hal ini menentang bahwa, kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi selama tahun 2018-2022 belum mengalokasikan dananya untuk pembangunan daerah dan lebih dominan untuk belanja aparatur pemerintahan.

## **5. Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah**

Hasil analisis menunjukkan bahwa, pertumbuhan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi belum begitu baik karena beberapa tahun selalu mengalami penurunan. Tetapi di tahun 2022 mulai mengalami peningkatan kembali.

Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode satu ke periode berikutnya baik dilihat dari sumber pendapatan maupun pengeluaran. Rasio pertumbuhan menggambarkan bahwa, semakin tinggi tingkat pertumbuhan suatu daerah maka akan semakin tinggi keberhasilan yang akan dicapai suatu daerah dalam setiap tahunnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil temuan Mubin (2017) yang menyatakan bahwa, kinerja keuangan daerah DISPENDA Kota Malang memiliki rasio pertumbuhan yang baik, begitu pula dengan hasil temuan penelitian ini yang menunjukkan bahwa hasil rata-rata pertumbuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi memiliki tingkat yang positif selama 2018-2022.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Rasio kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi sudah cukup baik dan mandiri dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat.
2. Rasio efektivitas PAD Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi belum cukup efektif dalam menjalankan tugasnya. Hal itu menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi belum cukup mencapai tingkat efektif.
3. Rasio efisiensi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi masih belum efisien dan dapat dikatakan bahwa tingkat pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi belum optimal dalam mengefesiesikan dananya. Hal ini dibuktikan dengan fluktuatifnya realisasi Belanja setiap tahunnya.
4. Rasio Keserasian Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi sudah masih belum optimal dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunannya. Hal ini ditunjukkan dengan belanja aparatur pemerintah lebih dominan dengan belanja pembangunan daerah.
5. Rasio pertumbuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi belum menunjukkan keadaan yang cukup baik dan positif. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi masih belum berjalan optimal.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian tersebut, maka penulis mencoba mengemukakan beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat diantaranya:

1. Disarankan kepada pihak manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi untuk mengevaluasi rasio kemandirian daerah Kabupaten Dairi untuk lebih meningkatkan kemandirian daerah sehingga tetap menjadi delegatif. Dengan demikian Kabupaten Dairi benar-benar dikatakan sudah mampu mandiri tanpa campur tangan dari pemerintah.
2. Disarankan kepada pihak manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi untuk selalu memantau tingkat efektivitas, agar realisasi yang dianggarkan sesuai dengan target yang telah di tetapkan.
3. Disarankan kepada pihak manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi untuk selalu melihat tingkat efesiensi belanja daerahnya, guna mengontrol tingkat belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah.
4. Disarankan kepada pihak manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi untuk selalu melihat keserasian dalam pengoperasian belanja pemerintah, guna mengetahui arah dan alur pengalokasian dana sudah sesuai atau belum.
5. Disarankan kepada pihak manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi untuk mengevaluasi tingkat pertumbuhan daerah yang dimiliki guna bermanfaat untuk mengetahui apakah kinerja keuangan APBD nya positif atau negatif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdiyanto, et al. 2023. The development economic growth for sustainable development with augmented dickey fuller (empirical study for neoclassical economic growth from solow and swan). *Kurdish Studies*, 11(2), pp. 3206-3214
- Abdul, Halim. dan Muhammad, Iqbal. 2017. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Jogjakarta : Penerbit UPP AMP YKPN.
- Abdul, Halim. dan Syam, Kusufi. 2017. *Teori Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Ardila, Isna, Ayu Anindya Putri. 2015. Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value for Money Pada Pengadilan Tebing Tinggi. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*. Vol.15.No.1.
- Atmawati, Lilis. 2013. Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Rasio Keuangan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Skripsi Universitas Muhammadiyah Palembang. (Publikasi).
- Ariani, Rahayu. 2016. Pengaruh Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Syariah Paper Accounting FEB UMS* ISSN 2460-0784.
- Susanti, E., Raharjo, K., & Oemar, A. 2017. Analisis Rasio Laporan Keuangan APBD (Anggaran Pendapatan Daerah) Sebagai Tolok Ukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2012-2016. 1–16.
- Cynthia, E.P. et al. 2022. Convolutional Neural Network and Deep Learning Approach for Image Detection and Identification. *Journal of Physics: Conference Series*, 2394 012019, pp. 1-6
- Cynthia, E. P., Rahadjeng, I. R., Karyadiputra, E., Rahman, F. Y., Windarto, A. P., Limbong, M., ... & Yarmani, Y. (2021, June). Application of K-Medoids Cluster Result with Particle Swarm Optimization (PSO) in Toddler Measles Immunization Cases. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1933, No. 1, p. 012036). IOP Publishing.
- Diana, Apri. 2017. Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Dan Aset Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2012 – 2015). Skripsi Universitas Nusantara PGRI Kediri. (Publikasi).
- Fahmi, M. 2018. *Analisis Kinerja Keuangan Panduan bagi Akademisi, Manajer, dan Investor untuk Menilai dan Menganalisis Bisnis dari Aspek Keuangan*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Fauzil, Mubin. 2017. Analisis Kinerja Keuangan Dinas pendapatan Daerah (Dispenda) dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang. *Jurnal Ekonomika*.

- Hutagaol, Kristina. 2021. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Di Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Eprints IPDN*.
- Hidayat, M., Rangkyu, D. M., Ferine, K. F., & Saputra, J. (2024). The Influence of Natural Resources, Energy Consumption, and Renewable Energy on Economic Growth in ASEAN Region Countries. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 14(3), 332-338.
- Indrawan, M. I., Alamsyah, B., Fatmawati, I., Indira, S. S., Nita, S., Siregar, M., ... & Tarigan, A. S. P. (2019, March). UNPAB Lecturer Assessment and Performance Model based on Indonesia Science and Technology Index. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1175, No. 1, p. 012268). IOP Publishing.
- Indra, Annafi. 2015. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Analisis Rasio Keuangan Apbd Kabupaten/Kota Di Indonesia Sebelum Dan Sesudah Penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. *Jurnal JRAK*. Vol.6 No.2.
- Kaho, Josef Riwu. 2018. *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Karamoy. 2013. Analisis Kinerja realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah kota tomohon tahun anggaran 2011-2013. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
- Kasmir. 2016. *Analisis Laporan keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Kelfani. 2019. Analisis Anggaran Kinerja Sektor Publik Pada Dinas Perhubungan Kota Palembang. Skripsi Universitas Negeri Palembang. (Publikasi).
- Lubis, Hafni Nurlia. 2017. Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu Tahun Anggaran 2011–2013. *KITABAH: Volume 1. No. 1 Januari – Juni 2017*.
- Mahsun, M. 2014. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPF. Mardiasmo.
2013. *Perpajakan: Edisi Revisi*. Andi: Yogyakarta.
- Mulyadi dan Jhoni Setiawan. 2016. *Sistem Akuntansi*. Salemba Empat. Nordiawan.
2017. *Akuntansi Pemerintah*. Jakarta. Salemba Empat.
- Nasib, N., Azhmy, M. F., Nabella, S. D., Rusiadi, R., & Fadli, A. (2022). Survive Amidst the Competition of Private Universities by Maximizing Brand Image and Interest in Studying. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, 14(3), 3317-3328.
- Nasution, L. N., Suhendi, S., Rusiadi, R., Rangkyu, D. M., & Abdiyanto, A. (2022). Covid-19 Pandemic: Impact on Economic Stability In 8-Em Muslim Countries. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 336-352.
- NASUTION, L. N., RUSIADI, A. N., & PUTRI, D. 2022. IMPACT OF MONETARY POLICY ON POVERTY LEVELS IN FIVE ASEAN COUNTRIES.
- Nasution, L. N., Rangkyu, D. M., & Putra, S. M. (2024). The Digital Payment System: How Does It Impact Indonesia's Poverty?. *ABAC Journal*, 44(3), 228-242.

- Nasution, L. N., Sadalia, I., & Ruslan, D. (2022). Investigation of Financial Inclusion, Financial Technology, Economic Fundamentals, and Poverty Alleviation in ASEAN-5: Using SUR Model. *ABAC Journal*, 42(3), 132-147.
- Purba, R., Umar, H., Siregar, O. K., & Aulia, F. (2023). Supervision of Village Financial Management: will it be in Parallel with the Development of Village Officials?(a Study of North Sumatra Province). *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(12), e1930-e1930.
- Rangkuty, D. M., & Hidayat, M. (2021). Does Foreign Debt have an Impact on Indonesia's Foreign Exchange Reserves?. *Ekulilibrium: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 16(1), 85-93.
- Rusiadi, N. S. (2023). Modeling the Impact of Tourism Brand Love and Brand Trust on Increasing Tourist Revisit Intention: An Empirical Study. *Journal of System and Management Sciences*, 13(4), 399-415.
- RUSIADI, S., NOVALINA, A., NST, N., EFENDI, B., & NST, P. (2022). DYNAMIC RATIONAL EXPECTATIONS MODEL AND COVID-19 ON MONEY DEMAND IN CARISI COUNTRIES.
- Rusiadi, Hidayat, M., Rangkuty, D. M., Ferine, K. F., & Saputra, J. (2024). The Influence of Natural Resources, Energy Consumption, and Renewable Energy on Economic Growth in ASEAN Region Countries. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 14(3), 332-338.
- Ruslan, D., Tanjung, A. A., Lubis, I., Siregar, K. H., & Pratama, I. (2023). Monetary Policy in Indonesia: Dynamics of Inflation, Credibility Index and Output Stability Post Covid 19: New Keynesian Small Macroeconomics Approach. *Cuadernos de economía*, 46(130), 21-30.
- SUHENDI, RUSIADI., NOVALINA, A., NST, N., EFENDI, B., & NST, P. (2022). POST-COVID-19 ECONOMIC STABILITY CHANGES IN NINE COUNTRIES OF ASIA PACIFIC ECONOMIC COOPERATION.
- Widarman, A., Rahadjeng, I. R., Susilowati, I. H., Sahara, S., & Daulay, M. T. (2022, December). Analytical Hierarchy Process Algorithm for Define of Water Meter. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 2394, No. 1, p. 012030). IOP Publishing.
- Republik Indonesia. (1999). Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Jakarta: Legalitas.
- Republik Indonesia. (2003). Undang-undang No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Jakarta: Legalitas.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Jakarta: Legalitas.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta: Legalitas.

Republik Indonesia. (2005). Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Legalitas.

Republik Indonesia. 2011. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Legalitas.

Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta: Legalitas.



- Republik Indonesia. 2019. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Legalitas.
- Sari. 2020. Analisis Penerapan Sistem prosedur dan Pengeluaran Kas Menggunakan Uang Persediaan Pada Pemerintah Kota Binjai. Medan: Jurnal Akuntansi dan Bisnis Universitas Pembangunan Panca Budi.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: CV Alfabeta.
- Suliyanto. 2018. *Metode Penelitian Bisnis Untuk Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Yogyakarta: Andi.
- Susanti, E., Raharjo, K., & Oemar, A. 2017. Analisis Rasio Laporan Keuangan APBD (Anggaran Pendapatan Daerah) Sebagai Tolok Ukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2012-2016. 1-16.
- Wahyuni, Nanik. 2014. Analisis Rasio untuk mengukur kinerja pengelolaan keuangan daerah kota malang. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN MALIKI: Malang.